

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

*Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA)* merupakan salah satu kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat, serta undang-undang yang menekankan pada keseriusannya untuk menetapkan musuh-musuhnya (Rusia, Iran dan Korea Utara) sebagai ancaman negaranya oleh Presiden Donald Trump pada 2 Agustus 2017. Aturan tersebut bertujuan untuk memperluas hukuman berupa sanksi dan embargo yang diberikan pemerintah AS kepada sejumlah negara yang telah membeli senjata dari Rusia atau Iran, serta menjalin hubungan dagang dengan Korea Utara (CNN Indonesia, 2020). Kebijakan tersebut dapat diamati pada bagaimana Amerika Serikat memberlakukannya pada India yang telah melakukan kerjasama pertahanan dan keamanan dengan Rusia.

Secara historis, India telah memiliki hubungan bilateral yang baik dengan Rusia sejak lama. Hal ini dimulai pada tahun 1960an, dimana India menerima sanksi dari AS dengan mengakhiri semua penjualan senjatanya ke India akibat perang pada tahun 1965 dan 1971. Namun, Uni Soviet tidak memberikan sanksi terhadap India. Hal tersebut berulang ketika India melakukan serangkaian uji coba nuklir pada tahun 1974 dan 1998, AS juga menjatuhkan sanksi terhadap India, namun Uni Soviet atau Rusia tidak melakukannya, bahkan setuju untuk mengirimkan air berat untuk reaktor nuklirnya, setelah AS dan Kanada menanggukahkan pengiriman untuk tujuan tersebut (Sud, 2022).

Di bidang militer, tercatat pada *working paper of Stimson Center* tahun 2020, Rusia merupakan *supplier* pertahanan terbesar India dimana 70% dari 85% platform militer India adalah buatan Rusia. Secara spesifik, tercatat sebanyak 90% perlengkapan Angkatan Darat, sekitar 70% perlengkapan Angkatan Laut dan sekitar 70% peralatan Angkatan Udara India berasal dari Rusia. Kesepakatan dengan Rusia sering kali mencakup proyek skala rendah berdasarkan pengembangan dan produksi dalam negeri, seperti kesepakatan baru-baru ini senilai \$677 juta untuk bersama-sama memproduksi lebih dari 600.000 senapan serbu AK-203 di India. Hal ini juga mencakup peralatan multiguna, yang memiliki penerapan luas untuk digunakan dalam berbagai dimensi militer dan membantu dalam meningkatkan kemandirian India dalam manufaktur pertahanan (Sud, 2022).

Ketergantungan tersebut juga melatarbelakangi mengapa India memutuskan untuk membeli sistem keamanan seperti S-400 agar memengaruhi keseimbangan militer di Asia Selatan dan struktur aliansi di kawasan. Alhasil, dapat diamati bahwa hubungan India–Rusia tidak semata-mata ekonomis; melainkan juga memiliki konsekuensi geopolitik yang luas bagi jaringan keamanan regional kawasan Asia Selatan, dimana terdapat tiga aktor yang membentuk arsitektur keamanan kawasan tersebut, yaitu China, India dan Pakistan. Beberapa penelitian menyoroti dilema keamanan dan trilema yang dihadapi oleh tiga aktor di Asia Selatan. China, India, dan Pakistan yang saling berinteraksi dalam matriks keamanan segitiga (Ahmed et al., 2023).

Berkenaan dengan hal tersebut, India juga telah membangun hubungan yang baik dengan Amerika Serikat. India melihat kemitraan dengan Amerika Serikat sebagai hal yang penting dalam mencapai keberhasilan ekonomi dan meningkatkan penerimaannya sebagai aktor regional dan internasional (Grave, 2019). Kemitraan India dengan Amerika Serikat, telah memperoleh momentum barunya pada tahun 2004 yang didasari pada kekhawatiran dan rasa tidak aman sehingga mereka memutuskan untuk meningkatkan kerja sama pertahanan bilateral dalam beberapa tahun terakhir, seperti *the next step in strategic partnership* (2004), *the Indo-US civil nuclear deal* (2005), *the new framework for India-US defense relationship* (2005), *the US-India enhanced cooperation act* (2019), *the basic exchange cooperation agreement* (2020), *the space situational awareness agreement* (2022) dan kerjasama lainnya (Ahmed et al., 2023).

Namun, perlu diketahui bahwa meskipun India telah bekerjasama dengan Rusia, Amerika Serikat justru memberikan pengampunan kepada India dan tidak memberlakukan CAATSA terhadapnya dengan memasukkan pengabaian tersebut kedalam *National Defense Authorization Act* tahun 2019, dimana jaminan tersebut disampaikan oleh Jim Inhofe selaku senator Amerika Serikat, yang menganggap bahwa India adalah salah satu negara sekutu strategis Amerika Serikat di Asia (Prastiti, 2019). Namun, perlu dipahami bahwa tendensi tersebut, juga dapat berimplikasi ke berbagai aspek, termasuk kepada hubungan bilateral AS dengan India atau India dengan Rusia. Dalam hal ini, terjadi perubahan pola akuisisi persenjataan yang mampu memengaruhi

keseimbangan militer regional, tekanan eksternal secara tidak langsung akan mendorong India untuk menegaskan kembali prinsip “*strategic autonomy*”, yaitu prinsip untuk memilih jalur kebijakan yang meminimalkan ketergantungannya pada satu pihak manapun, yang pada akhirnya akan menciptakan ketidakpastian bagi kebijakan keamanan di Asia Selatan.

Namun, secara pasti, hubungan Amerika Serikat dengan India akan tetap berada pada tingkat yang rendah, dan tidak akan menyerupai hubungan AS-Jepang dan AS-Korea Selatan. Berkenaan dengan hal tersebut, kebijakan Trump terkait dengan CAATSA terhadap India justru berpotensi menimbulkan konsekuensi jangka pendek dan jangka menengah, yang semuanya berdampak pada konfigurasi keamanan Asia Selatan (Lou, 2024).

Hal ini berkaitan dengan keamanan regional yang terjadi di Asia Selatan, dimana terjadi dilema keamanan yang melibatkan beberapa aktor seperti persaingan dan konflik yang melibatkan Pakistan dan India yang telah terjadi sejak 1947 atas wilayah Kashmir (Bimantara, 2025). Selain itu, dominasi India di kawasan seringkali memicu ketegangan dengan negara tetangganya, hingga negara-negara kecil di kawasan tersebut justru mencari dukungan eksternal demi mengimbangi pengaruh India dalam dinamika keamanan di kawasan tersebut (Nur et al., 2025). Di saat yang bersamaan, Asia Selatan juga mengalami stagnasi regionalisme, dimana inisiatif negara-negara di kawasan untuk mengedepankan agenda regionalisme tergolong masih minim (Segara, 2023a).

Oleh karena itu, dengan pemberlakuan CAATSA Amerika Serikat terhadap India, maka secara tidak langsung akan mempengaruhi bagaimana dinamika keamanan regional di Asia Selatan, sehingga dengan permasalahan tersebut maka penulis berupaya untuk menganalisis lebih dalam mengenai topik penelitian ini yang berjudul “Dampak Kebijakan Politik Luar Negeri Donald Trump Tentang Pelarangan Pembelian Persenjataan Rusia ke India Terhadap Keamanan Regional di Asia Selatan”.

## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembahasan mengenai latar belakang pada penelitian ini, penulis menetapkan beberapa batasan sehingga dapat memperjelas ruang lingkup penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini. Adapun batasan dalam penelitian ini adalah penelitian akan berfokus pada dampak potensi pemberlakuan CAATSA ke India di masa kepemimpinan Narendra Modi terhadap keamanan regional di kawasan Asia Selatan. Oleh karena batasan penelitian tersebut, maka penulis menetapkan beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut

1. Bagaimana respon kebijakan luar negeri India dalam menanggapi kebijakan CAATSA Amerika Serikat terkait pembelian senjata Rusia pada tahun 2018-2022?
2. Bagaimana dampak kebijakan CAATSA Amerika Serikat ke India terhadap keamanan regional Asia Selatan?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan batasan dan rumusan masalah yang telah ditentukan oleh penulis maka pada bagian ini penulis akan menetapkan beberapa tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Terdapat beberapa tujuan dan manfaat dalam penelitian ini, dimana tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui respon kebijakan luar negeri India dalam menanggapi kebijakan CAATSA Amerika Serikat terkait pembelian senjata Rusia pada tahun 2018-2022.
2. Untuk mengetahui dampak kebijakan CAATSA Amerika Serikat ke India terhadap keamanan regional Asia Selatan.

Selain tujuan yang disebutkan, beberapa manfaat dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan berdasarkan manfaat akademisi dan praktisi.

#### **1. Manfaat Akademis**

Diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi terhadap akademisi maupun mahasiswa sebagai salah satu sumber referensi dan sumber pengetahuan baru pada studi ilmu hubungan internasional khususnya yang berkaitan dengan respon kebijakan luar negeri India dalam menanggapi kebijakan CAATSA Amerika Serikat, mekanisme kebijakan CAATSA di India, serta dampaknya terhadap dinamika keamanan regional Asia Selatan.

#### **2. Manfaat Praktis**

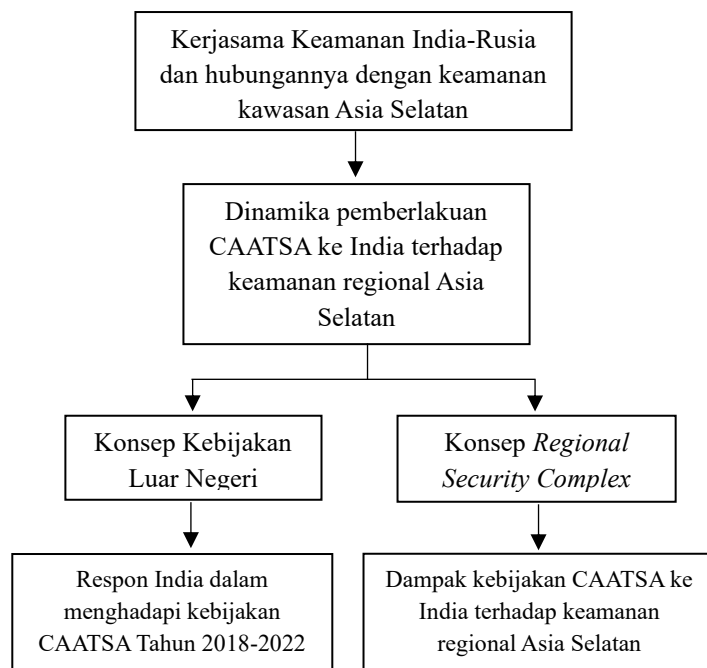
Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi para pemangku kebijakan dalam mengidentifikasi respon kebijakan luar negeri

India dalam menanggapi kebijakan CAATSA Amerika Serikat beserta dengan dampaknya terhadap dinamika keamanan regional Asia Selatan.

#### D. Kerangka Konseptual

Peneliti menggunakan dua konsep yaitu konsep kebijakan politik luar negeri dan konsep *regional security complex*. Konsep kebijakan politik luar negeri digunakan untuk membantu penulis dalam menganalisis realisasi kebijakan CAATSA milik Amerika Serikat dan respon kebijakan luar negeri India dalam menanggapi kebijakan tersebut pada tahun 2018-2022, serta konsep *regional security complex* untuk menganalisis dampak kebijakan CAATSA Amerika Serikat ke India terhadap keamanan regional Asia Selatan tahun 2018-2022. Berikut adalah bagan dari kerangka konseptual dalam penelitian ini.

Bagan 1.1 Kerangka Pikir Penelitian



Berdasarkan bagan diatas, dapat diamati bahwa bagan tersebut menggambarkan mengenai alur analisis penelitian yang berangkat dari kerja sama keamanan India–Rusia dan keterkaitannya dengan keamanan kawasan Asia Selatan, yang kemudian mengerucut pada dinamika pemberlakuan CAATSA terhadap India serta implikasinya bagi keamanan regional. Dinamika tersebut dianalisis melalui dua kerangka konseptual utama, yaitu konsep kebijakan politik luar negeri untuk menjelaskan respons India dalam menghadapi kebijakan CAATSA, serta konsep *regional security complex* untuk memahami keterkaitan dan pola interaksi keamanan di kawasan Asia Selatan. Melalui kedua pendekatan tersebut, penelitian menelaah secara empiris pada respon India dalam menghadapi kebijakan CAATSA dalam rentang tahun 2018–2022 sekaligus dampaknya terhadap stabilitas dan konfigurasi keamanan regional Asia Selatan secara lebih luas. Adapun penjelasan mengenai dua konsep tersebut adalah sebagai berikut.

#### 1. Konsep Kebijakan Luar Negeri

Menurut Rosenau, kebijakan luar negeri adalah upaya suatu negara melalui keseluruhan sikap dan aktivitasnya untuk mengatasi dan memperoleh keuntungan dari lingkungan eksternalnya (Rosenau 1976). Artinya, setiap upaya dan aktivitas yang dilakukan oleh suatu negara ke lingkungan eksternalnya harus berorientasi pada memperoleh keuntungan dan mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh mereka. Tujuan dari kebijakan luar negeri pun dirancang, dipilih, dan ditetapkan oleh pembuat keputusan, yang kemudian dikendalikan untuk mengubah kebijakan

(*revisionist*) atau mempertahankan kebijakan (*status quo policy*) ihwal kenegaraan tertentu di lingkungan internasionalnya (Olton, 1999). Dalam merealisasikan kebijakan luar negeri, terdapat beberapa instrumen yang dapat digunakan sebagaimana menurut Holsti yaitu diplomasi, propaganda, ekonomi, pengaruh politik, intervensi dan tindakan militer terselubung, serta persenjataan dan perang (Holsti, 1998).

Selain itu, dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri, mencakup beberapa langkah yaitu (i) menjabarkan pertimbangan kepentingan nasional kedalam bentuk tujuan dan sasaran yang spesifik, (ii) menetapkan faktor situasional di lingkungan domestik dan internasional yang berkaitan dengan tujuan kebijakan politik luar negeri, (iii) menganalisis kapabiilitas nasional untuk menjangkau hasil yang dikehendaki, (iv) mengembangkan perencanaan atau strategi untuk memakai kapabilitas nasional dalam menanggulangi variabel tertentu sehingga mencapai tujuan yang telah ditetapkan, (v) melaksanakan tindakan yang diperlukan, dan (vi) secara periodik meninjau dan melakukan evaluasi perkembangan yang telah berlangsung dalam menjangkau tujuan atau hasil yang dikehendaki (Olton, 1999).

Selain itu, sumber utama dari perumusan kebijakan luar negeri juga diperkenalkan oleh Yani dalam Haikal , yaitu sumber sistemik (*systemic sources*), sumber masyarakat (*societal sources*), sumber pemerintahan (*governmental sources*), dan sumber idiosinkratik (*idiosyncratic sources*).

1. Sumber sistemik meliputi berbagai sumber yang berasal dari lingkungan eksternal suatu negara, seperti struktur hubungan di antara negara-negara besar, pola-pola aliansi yang terbentuk diantara negara-negara dan faktor situasional eksternal yang dapat berupa isu area atau krisis.
2. Sumber masyarakat merupakan sumber yang berasal dari lingkungan internal, seperti faktor kebudayaan dan sejarah, pembangunan ekonomi, struktur sosial dan perubahan opini publik.
3. Sumber pemerintahan merupakan sumber internal yang terkait dengan pertanggungjawaban politik dan struktur pemerintahan, seperti pemilu, kompetisi partai dan tingkat kemampuan elit, serta struktur kepemimpinan dari berbagai kelompok dan individu yang terdapat dalam pemerintahan.
4. Sumber idiosinkratik merupakan sumber internal yang melibatkan nilai-nilai pengalaman, bakat serta kepribadian elit politik yang mempengaruhi kebijakan luar negeri negara (Haikal, 2018).

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis menganalisis mengenai pengaruh pemberlakuan CAATSA terhadap India tahun 2018-2022. Disini, penulis akan menekankan instrumen yang digunakan oleh suatu negara untuk melaksanakan kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat. Dengan memahami hal tersebut maka penulis diharapkan dapat memudahkan analisa terkait pengaruh pemberlakuan CAATSA Amerika Serikat di India tahun 2018-2022.

## 2. Konsep *Regional Security Complex*

*Regional security complex* merupakan sekelompok negara yang perhatian utama keamanannya cukup saling terkait sehingga keamanan nasional mereka tidak dapat dianggap terpisah secara realistis (Buzan, 1983). Gjurovski (2025) pun menambahkan bahwa *regional security complex* adalah titik awal teoretis yang menempatkan subsistem regional sebagai objek analisis keamanan, dan menawarkan kerangka analitis untuk menangani sistem-sistem tersebut. Menurut Shiddiqy et al (2024a), *regional security complex* merujuk pada jaringan kompleks hubungan keamanan antar negara di suatu wilayah. Pembentukannya pun dipengaruhi oleh distribusi kekuasaan dan sejarah hubungan persahabatan/permusuhan antara negara-negara di kawasan tersebut. Oleh karena itu, konsep ini menunjukkan bahwa dinamika keamanan di tingkat regional begitu berbeda dengan dinamika yang terjadi di tingkat global sehingga membutuhkan analisis yang terpisah (Nathali et al., 2023).

Buzan mengatakan dan mengklarifikasi bahwa *security complex* sebagai pola-pola kompleks keselarasan dan permusuhan yang ditentukan oleh keadaan sejarah. Secara terperinci, ia pun memaparkan secara mendetail terkait adanya hubungan antara *amity* dan *enmity* dalam *security complexes* (Andžāns, 2023). Selain itu, konsep *regional security complex* dibentuk untuk menganalisis dinamika keamanan dalam suatu wilayah tertentu, dan secara spesifik mengkaji dimensi saling ketergantungan keamanan antar negara, yang mencakup ancaman dan solusi yang sesuai.

Hal ini mengakui bahwa ancaman dan respons tidak terisolasi tetapi dibentuk oleh kedekatan dan pola interaksi historis (Alabi & Işiksal, 2025)

Buzan menegaskan bahwa *amity* adalah hubungan yang berkisar dari persahabatan sejati hingga harapan akan perlindungan atau dukungan dan *enmity* yang dapat didefinisikan sebagai hubungan yang dibangun oleh kecurigaan dan ketakutan. Hubungan keduanya pun telah terdapat pada beberapa karya selanjutnya yang telah memberikan dampak signifikan terhadap pemahaman terkait *amity* dan *enmity* dalam *regional security complex* dalam hubungan antar negara (Andžāns, 2023).

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis menganalisis mengenai dampak pemberlakuan CAATSA ke India terhadap keamanan regional Asia Selatan menggunakan teori *regional security complex*.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Mengenai tipe penelitian, penulis menetapkan tipe penelitian kualitatif deskriptif dalam penelitian ini. Penelitian kualitatif deskriptif adalah suatu penelitian yang menitikberatkan fokusnya dalam memberi penjelasan terhadap suatu gambaran dari berbagai kumpulan data yang spesifik. Tipe penelitian ini menjelaskan jawaban dari suatu permasalahan yang dengan mengandalkan berbagai kumpulan data yang relevan dengan topik penelitian yang kemudian proses pengolahan datanya dilakukan dengan penyajian, analisis, serta penginterpretasian atas hasil yang telah didapatkan.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Mengenai teknik pengumpulan data, penulis menetapkan teknik pengumpulan data melalui studi literatur. Studi literatur merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengumpulan data-data yang didapatkan dari berbagai sumber yang dianggap kredibel seperti jurnal, buku, artikel, serta website yang kredibilitasnya dapat dipercaya serta berkorelasi dengan topik yang menjadi fokus penelitian. Penulis mengumpulkan data dari jurnal-jurnal yang meneliti mengenai CAATSA dan pemberlakuannya terhadap negara-negara yang disanksi oleh Amerika Serikat, dinamika kerjasama India dengan Amerika Serikat dan Rusia, serta yang menganalisis mengenai dinamika keamanan regional Asia Selatan. Begitupun dengan buku-buku dan artikel yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian penulis, serta website pemerintah Amerika Serikat yang memiliki keterkaitan dengan CAATSA, serta website pemerintah India dan Rusia yang memiliki keterkaitan dengan kerjasama keamanan yang telah mereka realisasikan sebelumnya.

## 3. Teknik Analisis Data

Mengenai teknik analisis data, penulis menetapkan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan teknik tersebut, permasalahan yang diteliti akan dianalisis dengan cara penggambaran berdasarkan fakta-fakta yang ada, kemudian menghubungkan fakta tersebut dengan fakta lainnya sehingga menghasilkan argumen yang tepat.

## F. Sistematika Penulisan

Adapun Berikut merupakan penjabaran sistematika penulisan penelitian yang penulis bagi menjadi lima bab:

**BAB I Pendahuluan.** Bab ini berisi latar belakang, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan

**BAB II Tinjauan Pustaka.** Bab ini berisi penjelasan mengenai teori-teori yang berkaitan sebagai acuan penelitian yaitu konsep kebijakan luar negeri dan konsep *regional security complex*.

**BAB III Gambaran Umum.** Bab ini berisikan penjelasan dari gambaran umum mengenai program CAATSA di India, dinamika keamanan regional Asia Selatan, dan hubungan kerjasama keamanan India dengan Amerika Selatan dan Rusia.

**BAB IV Analisis dan Hasil Penelitian.** Bab ini berisikan hasil dari analisis data-data yang telah dikumpulkan sebagai jawaban dari rumusan masalah penelitian yaitu respon kebijakan luar negeri India dalam menanggapi ancaman kebijakan CAATSA Amerika Serikat terkait pembelian senjata Rusia, serta dampak kebijakan CAATSA Amerika Serikat ke India terhadap keamanan regional Asia Selatan.

**BAB V Kesimpulan.** Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah didapatkan beserta saran dari penulis untuk penelitian ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Konsep Kebijakan Luar Negeri**

Dalam konteks global, kebijakan luar negeri berperan penting bagi suatu negara sebab bertujuan dalam menjaga stabilitas regional dan mengadvokasi nilai-nilai yang dijunjung tinggi (Wati & Burdah, 2024). Kebijakan luar negeri merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana negara menunjukkan dan menyebarkan kekuasaannya, dimana semakin besar kebijakan tersebut ke dunia internasional maka semakin besar pula kekuasaan/pengaruh yang didapatkan oleh negara tersebut (Untung, 2021). Wargi (2021) menambahkan bahwa kebijakan luar negeri dapat dianggap sebagai akumulasi pengambilan keputusan melalui berbagai pertimbangan yang didasari oleh kepentingan nasional negara. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Rosenau bahwa kebijakan luar negeri adalah upaya suatu negara melalui keseluruhan sikap dan aktivitasnya untuk mengatasi dan memperoleh keuntungan dari lingkungan eksternalnya (Rosenau 1976).

Selain itu, berdasarkan pembahasan sebelumnya, kebijakan luar negeri juga dapat dipahami sebagai setiap upaya dan aktivitas yang dilakukan oleh suatu negara ke lingkungan eksternalnya harus berorientasi pada memperoleh keuntungan dan mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh mereka. Dalam memahami bagaimana kebijakan luar negeri dipahami oleh negara, terdapat tiga sudut pandang dalam memahami kebijakan luar negeri, yaitu sebagai

sekumpulan orientasi (*as a cluster of orientation*), sebagai seperangkat komitmen dan rencana untuk bertindak (*as a set of commitments to and plan for action*), dan sebagai bentuk perilaku atau aksi (*as a form of behaviour*) (Rosenau et al., 1976).

Modelski dalam Wati & Burdah (2024) menuturkan bahwa kebijakan luar negeri bertujuan dalam memajukan kepentingan negara di luar negeri, memperoleh prestise dan pengaruh negara lain, hingga mempertahankan keamanan bersama, sehingga kebijakan luar negeri dapat diidentikkan sebagai refleksi dari kebijakan prioritas domestik. Tujuan dari kebijakan luar negeri dirancang, dipilih, dan ditetapkan oleh pembuat keputusan, yang kemudian dikendalikan untuk mengubah kebijakan (*revisionist*) atau mempertahankan kebijakan (*status quo policy*) ihwal kenegaraan tertentu di lingkungan internasionalnya (Olton, 1999).

Dalam merealisasikan kebijakan luar negeri, terdapat beberapa instrumen yang dapat digunakan sebagaimana menurut Holsti yaitu diplomasi, propaganda, ekonomi, pengaruh politik, intervensi dan tindakan militer terselubung, serta persenjataan dan perang (Holsti, 1998). Hal tersebut juga didukung oleh Wati & Burdah (2024) bahwa diplomasi, perdagangan, keamanan, kerjasama hingga partisipasi dalam organisasi internasional dianggap sebagai komponen kebijakan luar negeri

Selain itu, dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri, mencakup beberapa langkah yaitu (i) menjabarkan pertimbangan kepentingan nasional kedalam bentuk tujuan dan sasaran yang spesifik, (ii) menetapkan faktor

situasional di lingkungan domestik dan internasional yang berkaitan dengan tujuan kebijakan politik luar negeri, (iii) menganalisis kapabiilitas nasional untuk menjangkau hasil yang dikehendaki, (iv) mengembangkan perencanaan atau strategi untuk memakai kapabilitas nasional dalam menanggulangi variabel tertentu sehingga mencapai tujuan yang telah ditetapkan, (v) melaksanakan tindakan yang diperlukan, dan (vi) secara periodik meninjau dan melakukan evaluasi perkembangan yang telah berlangsung dalam menjangkau tujuan atau hasil yang dikehendaki (Olton, 1999).

Berkenaan dengan perumusan kebijakan luar negeri, kebijakan luar negeri juga dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal berkaitan dengan beragam faktor yang berada didalam negeri suatu negara dan bersangkutan antara negara dengan masyarakatnya, seperti sejarah dan budaya negara tersebut, kondisi geografis, penduduk, kondisi ekonomi, kapabilitas militer hingga kondisi politik. Adapun faktor eksternal melibatkan beragam faktor yang berasal dari luar negara tersebut, seperti negara-negara lain, komunitas internasional, dinamika politik global dan sejenisnya, yang berupa konflik, ancaman, kerjasama hingga dukungan langsung dari aktor negara maupun non negara lainnya (Prabhandhari & Aryani, 2021).

Selain itu, sumber utama dari perumusan kebijakan luar negeri juga diperkenalkan oleh Rosenau dalam Yani, yaitu sumber sistemik (*systemic sources*), sumber masyarakat (*societal sources*), sumber pemerintahan

(*governmental sources*), dan sumber idiosinkratik (*idiosyncratic sources*).

Berikut adalah penjelasannya.

1. Sumber sistemik meliputi berbagai sumber yang berasal dari lingkungan eksternal suatu negara, seperti struktur hubungan di antara negara-negara besar, pola-pola aliansi yang terbentuk diantara negara-negara dan faktor situasional eksternal yang dapat berupa isu area atau krisis.
2. Sumber masyarakat merupakan sumber yang berasal dari lingkungan internal, seperti faktor kebudayaan dan sejarah, pembangunan ekonomi, struktur sosial dan perubahan opini publik.
3. Sumber pemerintahan merupakan sumber internal yang terkait dengan pertanggungjawaban politik dan struktur pemerintahan, seperti pemilu, kompetisi partai dan tingkat kemampuan elit, serta struktur kepemimpinan dari berbagai kelompok dan individu yang terdapat dalam pemerintahan.
4. Sumber idiosinkratik merupakan sumber internal yang melibatkan nilai-nilai pengalaman, bakat serta kepribadian elit politik yang mempengaruhi kebijakan luar negeri negara (Haikal, 2018).

Faktor-faktor yang memengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara dapat diringkas ke dalam tiga perspektif analitis utama, yakni lensa idiosinkratik, struktur birokrasi, dan sistem politik. Lensa idiosinkratik menitikberatkan pada karakteristik personal pemimpin negara, termasuk latar belakang, preferensi, dan orientasi kebijakan yang diambilnya. Struktur

birokrasi berfungsi sebagai lensa untuk menganalisis mekanisme pengambilan keputusan, dinamika antar-lembaga, hingga proses implementasi kebijakan luar negeri. Adapun lensa sistem politik mencakup analisis yang lebih luas, tidak hanya terhadap dinamika politik domestik, tetapi juga terhadap interaksi dan konfigurasi kekuasaan dalam sistem politik internasional (Matondang, 2021).

## **B. Konsep *Regional Security Complex***

Secara historis, *regional security complex* diperkenalkan oleh Buzan dalam bukunya “*People, States, & Fear*” yang dipublikasikan pada tahun 1983, dikembangkan oleh Buzan, Waever & Wilde pada tahun 1998 dalam bukunya “*Security: A New Framework for Analysis*”, dan akhirnya diperbarui kembali melalui buku “*Regions and Powers: The Structure of International Security*” pada tahun 2003 oleh Buzan & Waever (Alarsah, 2023). *Regional security complex* dipahami sebagai sekumpulan unit yang proses utama sekuritisasi, de-sekuritisasi, atau keduanya saling terkait sedemikian rupa sehingga masalah keamanan mereka tidak dapat dianalisis atau diselesaikan secara terpisah satu sama lain (Buzan & Waever, 2003).

Selain menghadirkan proses dari sekuritisasi, desekuritisasi atau keterkaitan keduanya, Buzan juga memperkenalkan bahwa karena pembentukan dan pengoperasian konsep *regional security complex* bergantung pada pola persahabatan (*amity*) dan permusuhan (*enmity*) di antara unit-unit dalam sistem, yang membuat sistem regional bergantung pada tindakan dan interpretasi para aktor (Buzan & Waever, 2003). Konsepsi

mengenai *amity* (persahabatan) mencakup kerjasama atau hubungan antar negara dalam suatu kawasan hingga mendapat ekspektasi atas dukungan dan perlindungan antar satu sama lain. Adapun *enmity* (permusuhan) mencakup persaingan antar negara-negara terkait dengan atas dasar kecurigaan dan rasa takut (Anggraini, 2020).

Dalam menganalisis suatu dinamika keamanan yang terjadi di suatu kawasan, konsep mengenai *regional security complex* memberikan kerangka dalam mempermudah analisis terhadap dinamika dan integrasi regional sebab teori tersebut memiliki kerangka dalam memahami bagaimana dinamika polaritas dari kekuatan besar dapat beroperasi dalam sistem internasional yang turut memengaruhi dinamika keamanan suatu kawasan (Elzinga, 2021).

Kerangka dalam *regional security complex* mengacu pada struktur dan mekanisme yang diadopsi oleh sekelompok negara di wilayah tertentu untuk memastikan keamanan kolektif yang mengintegrasikan keamanan pertahanan dengan keamanan politik, ekonomi, dan lingkungan, serta untuk menghadapi ancaman bersama seperti terorisme dan konflik regional (Khelifi & Debla, 2025). Terjadinya ketidakamanan keamanan dalam suatu wilayah dipengaruhi oleh beberapa aspek dari internal kawasan tersebut seperti perbedaan di bidang ekonomi (keinginan untuk mengeksploitasi sumber daya), sosial (kejahatan transnasional), politik (perbedaan ideologi, kepentingan nasional, dan sistem pemerintahan), hingga militer (jumlah persenjataan militer) (Shiddiqy et al., 2024b), serta mencakup beberapa elemen, dimulai dengan kemerdekaan politik dan integritas teritorial negara,

sekaligus memastikan kepentingan yang sesuai dengan stabilitas negara dalam beberapa aspek, dan inklusivitasnya dalam bidang internal dan eksternal (Khelifi & Debla, 2025).

Berkenaan dengan hal tersebut, *regional security complex* dapat dipahami sebagai jaringan kompleks dari hubungan keamanan antar negara yang terjadi di kawasan tersebut (Shiddiqy et al., 2024b). Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Buzan yang mengidentifikasi Asia Selatan sebagai kasus *regional security complex* yang berbeda sebab adanya persaingan keamanan yang berkelanjutan antara India dan Pakistan, yang tidak hanya memengaruhi stabilitas regional tetapi juga mengurangi pengaruh kekuatan eksternal seperti Amerika Serikat atau Tiongkok (Sukaedi & Yogaswara, 2024).

Karakteristik dari homogen atau heterogen dari suatu kawasan dapat membedakan tipe-tipe dari *regional security complex*, yaitu *regional security complex* dengan tipe standar, *regional security complex* dengan tipe terpusat, dan *regional security complex* dengan tipe kekuatan besar (Buzan & Waever, 2003). Pada tipe standar, keamanan regional dapat diamati dari bagaimana kekuatan regional dalam suatu kawasan dapat menentukan polaritas, sebagaimana halnya Iran dan Arab Saudi di Timur Tengah. Pada tipe terpusat, keamanan regional cenderung terpusat sebab memiliki bentuk yang unipolar, sehingga negara tersebut dapat menikmati dominasinya tanpa adanya pesain di kawasan, sebagaimana halnya Amerika Serikat di Amerika Utara. Adapun pada tipe kekuatan besar, keamanan dipandang bersifat bipolar dan mencakup

dua kekuatan besar yang mencakup wilayah yang lebih luas, sebagaimana halnya dominasi Tiongkok dan AS di kawasan Asia Tenggara (Saputro et al., 2024).

Sehubungan dengan tipe dari *regional security complex*, terdapat dua alasan dibalik terjadinya *regional security complex*, yaitu keamanan internasional yang berasal dari masalah relasional, sehingga permasalahan di suatu kawasan tidak terlepas dari bagaimana hubungan relasional antar negara yang berkaitan dengan ancaman dan kerentanan. Selanjutnya, adalah kekuatan interdependensi yang kuat sehingga keamanan negara tidak dapat dilihat secara independen satu sama lain (Stivachtis, 2021).